

Strategi Kekuasaan Politik dalam Pidato Kampanye Paslon No. 3 Tri Rismaharini & Zahrul Azhar Asumta di Pilgub Jatim 2024: Analisis Wacana Kritis

Muhammad Ismail¹, Hadi Asrori², Pratista Shafa Brilliant³

¹ Universitas Airlangga dan muhammad.ismail-2024@fib.unair.ac.id

² Universitas Airlangga dan hadi.asrori-2023@fib.unair.ac.id

³ Universitas Airlangga dan pratista.afa.brilliant-2024@fib.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya analisis wacana kritis terhadap pidato politik sebagai sarana membangun citra dan mempengaruhi opini publik, khususnya pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Fokus penelitian ini adalah pidato pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta, yang diambil dari rekaman Deklarasi Kampanye Damai yang diunggah oleh Metro TV pada 24 September 2024 di YouTube. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis wacana kritis pidato tersebut menggunakan kerangka Fairclough, yang mencakup dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosial, serta memadukannya dengan teori kekuasaan Foucault untuk mengungkap bagaimana bahasa menjadi instrumen kekuasaan dalam ranah politik. Data dianalisis menggunakan teknik analisis wacana kritis Fairclough dengan mengidentifikasi unsur linguistik, konteks produksi, dan praktik sosial politik yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan calon menggunakan strategi bahasa untuk membangun citra sebagai pemimpin berintegritas, menegaskan relasi kuasa, dan membangun legitimasi di mata publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kombinasi teori Fairclough dan Foucault dalam menganalisis pidato kampanye di tingkat daerah, untuk menjadi rujukan bagi target audiens pada kampanye dalam memahami makna strategi kebahasaan yang digunakan dan wacana yang dibawa oleh para pelaku politik.

Kata Kunci: Kekuasaan, Analisis Wacana Kritis, Kampanye, Pemilihan Umum Daerah, Jatim 2024.

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of critical discourse analysis in speeches during the 2024 East Java gubernatorial election by candidate pair number 3, Tri Rismaharini and Zahrul Azhar Asumta, taken from the recorded speech of the Declaration of the Peaceful Campaign for the 2024 East Java Gubernatorial Election. The study aims to analyse critical discourse using Norman Fairclough's perspective, which includes text, discourse practice, and social practice employed by the candidates in their speech. The speech was uploaded by Metro TV on September 24, 2024, on YouTube. In addition to Fairclough's critical discourse analysis theory, this study also applies Michel Foucault's theory of power. This theory is used to reveal how power and knowledge are interconnected and how both are utilized to shape discourse in the candidates' speech. The research aims to examine how the candidates use power through language to build their image, influence voters, and strengthen their position within the political context. The data used is secondary data obtained from the speech uploaded by Metro TV on the aforementioned date. The findings reveal various aspects of critical discourse analysis in the campaign speech, covering the text, discourse practice, and social practice of candidate pair number 3, Tri Rismaharini and Zahrul Azhar Asumta. This study provides an overview of how the candidate pair uses language to build their image, influence voters, and reinforce their position within the political context.

Keywords: Power, Critical Discourse Analysis, Campaign, Regional Election, East Java 2024.

PENDAHULUAN

Bahasa adalah sistem komunikasi yang terdiri dari berbagai simbol, baik verbal maupun non-verbal, yang digunakan manusia untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan gagasan.

Bahasa memungkinkan manusia berinteraksi, menyampaikan informasi, dan memahami satu sama lain. Menurut Sapir (1921), bahasa adalah metode komunikasi manusia yang unik dan utama, baik dalam simbol lisan maupun tertulis, yang secara tidak langsung menyiratkan bahwa bahasa adalah instrumen yang digunakan untuk menggambarkan pemikiran seseorang dan dapat juga digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain. Fairclough (2000) juga mendefinisikan bahasa memiliki cakupan yang luas, terutama dalam politik, yang digunakan oleh politisi untuk menyampaikan ideologi, visi, dan kebijakan mereka kepada publik. Dengan menggunakan retorika yang efektif, mereka dapat mempengaruhi opini dan perilaku publik. Bahasa memainkan peran penting dalam membingkai isu-isu politik dan membentuk opini publik.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, politisi menggunakan bahasa untuk membangun narasi kampanye, mempengaruhi persepsi pemilih, dan membangun citra publik mereka. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bahasa berkaitan erat dengan kekuasaan; Foucault (1980) menyatakan bahwa kekuasaan adalah hubungan yang tertanam dalam interaksi sosial, bukan sekadar kepemilikan otoritas, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan untuk mengatur perilaku individu. Dahl (1957) berpendapat bahwa kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan orang lain dalam konteks pengambilan keputusan, seperti pada pemilihan umum. Dahl juga meneruskan bahwa kekuasaan politik melibatkan hubungan di mana seseorang dapat mempengaruhi banyak orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak akan mereka lakukan tanpa adanya pengaruh tersebut.

Sehingga strategi yang digunakan dalam berbahasa disini merupakan aspek esensial dari kekuasaan, yang berfungsi sebagai sarana bagi individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan orang lain dalam konteks politik. Strategi berfokus pada dinamika kekuasaan dan bagaimana strategi digunakan untuk mencapai dominasi dalam proses pengambilan keputusan. Foucault (1972) menambahkan bahwa kekuasaan pada dasarnya membutuhkan strategi, karena bahasa merupakan alat utama dalam membangun dan mempertahankan kekuasaan. Melalui wacana, kekuasaan dapat diartikulasikan dan direproduksi. Bahasa menciptakan pengetahuan atau 'kebenaran', yang kemudian digunakan untuk mengendalikan masyarakat.

Dalam hal ini pemilihan umum (Pemilu) merupakan bagian dari politik, dan tentu saja berkaitan erat dengan kekuasaan. Pemilu merupakan proses demokrasi yang mengharuskan warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan, dari posisi hierarki tertinggi seperti presiden hingga tingkat lokal seperti wali kota dan bupati. Pemilu memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan di setiap tingkatan. Proses ini biasanya melibatkan kampanye oleh kandidat atau partai politik pendukungnya, di mana mereka menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada rakyat. Oleh karena itu, hasil pemilu dapat dianggap sebagai cerminan kehendak mayoritas pemilihnya.

Pemilihan umum terdiri dari beberapa komponen yang berbeda, tergantung pada tingkat pemerintahan yang akan dipilih, salah satunya adalah Pilkada (pemilihan kepala daerah). Pilkada adalah proses pemilihan untuk memilih pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Layaknya pemilihan presiden (Pilpres), Pilkada diadakan setiap lima tahun, karena ketiga jabatan pemerintahan ini memiliki masa jabatan yang sama dengan presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum legislatif (Pileg) adalah proses demokrasi untuk memilih anggota legislatif. Pileg juga diadakan setiap lima tahun dengan alasan yang sama dengan Pilpres dan Pilkada. Pilkada merupakan bagian dari mekanisme demokrasi Indonesia, yang memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin mereka secara langsung di tingkat daerah. Salah satu jenis Pilkada adalah

pemilihan gubernur (Pilgub), yang menentukan pemimpin di tingkat provinsi dalam hierarki pemerintahan.

Pemilihan gubernur (Pilgub) memainkan peran krusial dalam mengarahkan pembangunan dan kebijakan di tingkat provinsi di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Pemilihan gubernur Jawa Timur 2024 menampilkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur: Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak, Luluk Nur Hamidah – Lukmanul Khakim, dan Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta. Salah satu pasangan calon yang paling menonjol adalah nomor urut 3, Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Risma – Gus Hans).

Dengan latar belakang Risma sebagai mantan Wali Kota Surabaya yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang tegas, dan reputasi Gus Hans sebagai tokoh agama yang disegani, pidato-pidato mereka mengandung pesan-pesan yang mencerminkan nilai-nilai moralitas, integritas, dan identitas daerah yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pidato pasangan calon nomor urut 3 dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2024, Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta. Pidato yang dimaksud adalah pidato yang mereka sampaikan pada acara “Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Tugu Pahlawan, Surabaya, pada 24 September 2024.

Dalam proses kampanye, wacana yang digunakan oleh pasangan calon berperan penting dalam membentuk persepsi publik, memperkuat legitimasi politik, dan memobilisasi dukungan publik, terutama dari para pemilih dalam pemilu. Van Dijk (1998) juga menyatakan bahwa wacana politik terdiri dari serangkaian teks dan interaksi yang berkaitan dengan isu-isu politik. Ia menekankan pentingnya analisis wacana dalam memahami bagaimana kekuasaan, ideologi, dan dominasi dikonstruksi dan dipertahankan dalam komunikasi politik.

Dengan demikian, dengan menganalisis wacana dalam pidato-pidato mereka dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi komunikasi politik dan konstruksi ideologis yang disampaikan oleh para kandidat. Analisis Wacana Kritis (CDA) merupakan pendekatan yang sesuai untuk mengeksplorasi bagaimana kekuasaan, ideologi, dan praktik sosial dimanifestasikan dalam bahasa yang digunakan oleh para kandidat dalam pidato-pidato mereka. Dengan menggunakan kerangka kerja CDA oleh Fairclough, pidato dapat dipahami tidak hanya sebagai serangkaian kalimat yang disampaikan kepada publik, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konteks politik, sosial, dan budaya tempat pidato tersebut disampaikan. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji topik ini lebih lanjut untuk mengidentifikasi aspek-aspek wacana implisit dalam pidato pasangan kandidat nomor 3 dari perspektif Analisis Wacana Kritis oleh Fairclough.

LANDASAN TEORI

A. Analisis Wacana

Wacana menurut Sobur (2006) adalah hubungan antara berbagai konteks yang ada dalam teks, peran dari wacana ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang ada membentuk suatu wacana secara keseluruhan. Analisis wacana disimpulkan oleh Pawito (2007) sebagai metode untuk mengungkap makna atau pesan komunikasi dalam sebuah teks, baik dari segi tekstual maupun kontekstual, sehingga makna yang dieksplorasi dari sebuah teks atau pesan komunikasi

tidak hanya berasal dari apa yang tertulis secara eksplisit, tetapi juga dari konteks di sekitarnya.

B. Analisis Wacana Kritis

Salah satu bagian dari analisis wacana adalah analisis wacana kritis, Yasa (2021) menjelaskan bahwa AWK merupakan sebuah pendekatan yang berfokus pada kondisi diskursif dan konsekuensi dari berlangsungnya politik kekuasaan dari suatu kelompok atau institusi. Diskursif dalam konteks ini mengacu pada cara penggunaan bahasa dan wacana yang membentuk, mencerminkan, dan mengatur hubungan kekuasaan. Hal ini menjelaskan bagaimana bahasa berperan dalam struktur sosial dan bagaimana makna-makna diciptakan serta dipertahankan melalui praktik diskursif, sehingga kondisi diskursif adalah kondisi yang terkait dengan penggunaan dan efek bahasa dalam konteks kekuasaan dan politik.

Dalam studi analisis wacana kritis, metode yang paling sering digunakan adalah pendekatan Norman Fairclough. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti teks atau ucapan, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks sosial, budaya, dan politik. Menurut Fairclough (1995), wacana dipandang sebagai praktik sosial yang mencerminkan dan membentuk kekuasaan serta ideologi dalam masyarakat. Ia membagi analisis wacana menjadi tiga dimensi utama: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Ketiga dimensi ini saling berhubungan untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk mempertahankan atau mengubah hubungan kekuasaan. Ketiga dimensi utama dalam analisis wacana kritis Fairclough dijelaskan sebagai berikut:

1. Teks

Analisis wacana teks menganalisis secara langsung terhadap teks itu sendiri, termasuk struktur, gaya bahasa, dan elemen-elemen linguistik lainnya.

2. Praktik Wacana

Hal ini melibatkan bagaimana teks dibuat, ditransmisikan, dan diterima oleh audiens. Ini juga mencakup praktik produksi dan konsumsi teks.

3. Praktik Sosial

Konsep daripada praktik sosial digunakan untuk menggali konteks sosial di mana teks dibuat dan diterima, serta bagaimana teks tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kekuasaan sosial.

C. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan ini banyak difokuskan pada analisis pidato politik, karena pidato politik adalah salah satu bentuk wacana yang sangat sarat dengan kepentingan ideologis dan kekuasaan. Van Dijk (2008) menyebutkan bahwa wacana politik sering kali digunakan oleh politisi untuk membangun citra, legitimasi, serta memobilisasi dukungan. Melalui wacana, politisi dapat menyusun kondisi sosial sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak mereka atau mengesampingkan

lawan politik mereka. Beberapa studi yang dilakukan di Indonesia juga menggunakan pendekatan Fairclough untuk menganalisis pidato kampanye pemilu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2019) menekankan bahwa wacana dalam pidato kampanye sering kali menonjolkan ide-ide nasionalisme, pembangunan ekonomi, serta isu-isu identitas untuk mempengaruhi pemilih. Studi ini juga menekankan pentingnya menganalisis konteks sosial di balik penggunaan kata dan frasa tertentu yang sering kali dimaksudkan untuk menciptakan narasi tertentu dalam pemikiran pendengarnya.

Dalam memaparkan konteks kekuasaan yang dipakai dalam pidato Risma-Gus Hans, peneliti merujuk kepada teori Michel Foucault dalam mengartikan wacana kekuasaan yang digunakan Risma-Gus Hans dalam pidatonya. Peneliti menggunakan teori ini karena Foucault memiliki kontribusi besar dalam kajian filsafat dan sosiologi, terutama terkait hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, menurut peneliti teori Foucault dapat menjelaskan bagaimana 'pengetahuan' dan kekuasaan digunakan dalam menciptakan suatu kebenaran dalam masyarakat. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak dipandang semata-mata sebagai entitas yang menekan atau menindas, melainkan sebagai sesuatu yang melingkupi, memproduksi, dan membentuk pengetahuan atau kebenaran. Menurut Foucault, kekuasaan dan pengetahuan saling terkait erat, layaknya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, kekuasaan selalu hadir dalam pembentukan pengetahuan, dan pengetahuan selalu berperan dalam memproduksi dan memperkuat kekuasaan (Bahasoan & Kotarumalos, 2014).

Pemikiran ini dapat dilihat dalam cara kekuasaan dipraktekkan melalui berbagai mekanisme sosial dan kultural yang membentuk "rezim kebenaran." Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui bentuk otoritas formal, seperti negara atau institusi hukum, tetapi juga melalui wacana yang menyebarkan norma-norma, regulasi, dan cara berpikir tertentu yang dianggap benar atau sah. Dalam konteks ini, kekuasaan berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan kebenaran dan pengetahuan, serta untuk menormalisasi dan melegitimasi praktik-praktik sosial tertentu (Foucault, 1980).

Konsep "rezim kebenaran" yang diusulkan oleh Foucault menjadi penting dalam memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui wacana dan membentuk kebenaran yang dianggap absah dalam suatu masyarakat. Wacana tersebut mengandung pernyataan-pernyataan yang tampak sebagai kebenaran, dan kekuasaan yang mendasarinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi individu serta kelompok masyarakat untuk menerima dan mengikuti kebenaran tersebut. Oleh karena itu, kekuasaan tidak hanya menindas tetapi juga produktif, karena ia menciptakan dan menyebarkan pengetahuan yang mengarahkan tindakan individu di dalam masyarakat.

Lebih jauh lagi, Foucault juga mengungkapkan bahwa setiap kebudayaan dan masyarakat memiliki "rezim wacana" yang menentukan permainan kebenaran. Dalam permainan ini, setiap pernyataan yang dibuat oleh individu mengandung aspek penguasaan dan kontrol, karena wacana ini mencerminkan kekuasaan yang berlaku pada saat itu. Hal ini mencerminkan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui regulasi dan

normalisasi sosial, di mana wacana membentuk persepsi tentang kebenaran, pengetahuan, dan moralitas di dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian sosial, pemikiran Foucault ini relevan untuk menganalisis bagaimana berbagai institusi, seperti pendidikan, media, dan hukum, membentuk dan mereproduksi wacana yang mengarahkan cara berpikir dan bertindak masyarakat. Setiap wacana yang dihasilkan oleh kekuasaan, baik secara eksplisit maupun implisit, berperan dalam membangun kebenaran sosial yang mendominasi, dan mengarahkan individu untuk tunduk pada rezim kebenaran yang berlaku.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pasangan calon nomor urut 3 (Risma–Gus Hans) dalam Pilgub Jawa Timur 2024 menggunakan strategi kekuasaannya dalam membentuk wacana tertentu dalam pidato mereka untuk membangun citra, mempengaruhi opini masyarakat, serta menciptakan narasi yang sejalan dengan kepentingan politik mereka. Pendekatan analisis wacana kritis Fairclough dan teori Foucault dalam sudut pandang kekuasaan memberikan alat analisis yang kuat untuk mengkaji pidato tersebut dalam konteks relasi sosial, kekuasaan, dan ideologi yang ada pada pidato tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menerapkan Analisis Wacana Kritis (CDA) berdasarkan pendekatan Norman Fairclough untuk menafsirkan pidato deklarasi kampanye damai yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 3, Risma–Gus Hans. Penelitian ini fokus pada pidato pada acara “Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur” yang disampaikan oleh pasangan calon tersebut. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana wacana yang digunakan dalam pidato tersebut membangun citra politik dan mempengaruhi persepsi publik terhadap pendekatan kampanye yang akan mereka terapkan pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam dan komprehensif makna di balik kata dan frase yang digunakan dalam pidato pasangan calon nomor urut 3.

Data penelitian ini adalah transkrip pidato deklarasi kampanye damai pasangan calon nomor urut 3, yang diambil dari video di kanal YouTube Metro TV berjudul “BERITA TERKINI – Pidato Risma-Gus Hans di Deklarasi Kampanye Damai Pilgub Jatim 2024.” Transkrip tersebut diproduksi secara manual, berisi pidato lengkap Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkompilasi dan memverifikasi transkrip pidato, yang menjadi sumber utama penelitian. Data kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi unsur-unsur kunci dalam pidato tersebut berdasarkan teori Analisis Wacana Kritis oleh Fairclough.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis pidato Risma–Gus Hans menggunakan pendekatan CDA, kerangka kerja Fairclough membagi wacana menjadi tiga dimensi utama: teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana bahasa digunakan dalam konteks ini. Selain itu, teori kekuasaan oleh Michel Foucault juga digunakan untuk

memahami bagaimana pidato kampanye, sebagai objek penelitian ini, berfungsi sebagai alat kekuasaan yang mampu membentuk perilaku sosial melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh Risma-Gus Hans.

Elipsis (...) dalam pidato yang dikutip menunjukkan bahwa beberapa bagian audio dalam rekaman tidak jelas, sehingga kata-kata pembicara tidak sepenuhnya dipahami. Untuk menjaga keaslian data penelitian, peneliti menyajikan temuan persis seperti yang terdengar dalam rekaman, tanpa perubahan. Beberapa temuan relevan adalah sebagai berikut:

A. Analisis Teks

Dalam hal dimensi teks, bagaimana struktur bahasa digunakan dianalisis untuk dapat menyampaikan pesan. Pada pidato Risma-Gus Hans mengandung berbagai elemen linguistik yang mencerminkan sikap mereka terhadap kampanye politik, kejujuran, dan integritas. Beberapa temuan kunci yang digunakan adalah:

1. Penggunaan Sapaan Hormat

(Risma) "Assalamu'alaikum Wr. Wb., Selamat sore dan salam ... , shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu."

Risma membuka pidatonya dengan sapaan yang mencerminkan keberagaman agama dan kepercayaan. Langkah ini menunjukkan upayanya untuk memastikan setiap individu, tanpa memandang latar belakang, gender, etnis, atau agama, merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang setara. Dalam pidatonya, Risma berusaha merangkul seluruh lapisan masyarakat dari berbagai agama yang diakui di Indonesia melalui salam lintas agama, seperti "Assalamu'alaikum Wr. Wb." dari Islam, "Shalom" dari Kristen, "Om Swastiastu" dari Hindu, "Namo Buddhaya" dari Buddha, dan "Salam Kebajikan" dari Konghucu.

2. Kata Kunci dan Repetisi

(Risma) "Serta bapak ibu sekalian kami saya dengan Gus Hans dan seluruh tim kami insya Allah kami akan menyelenggarakan kampanye pemilu dengan kejujuran dan integritas yang tinggi."

(Risma) "Karena itu bapak ibu sekalian yang saya hormati, yakinlah bahwa kami pasangan saya-Gus Hans, sekali lagi pasangan no. 3, serta seluruh tim kampanye kami, kami akan melakukan seluruh proses Pemilukada dengan jujur dan berintegritas, insya Allah tidak ada niatan apa pun untuk menjelek-jelekkan siapa pun bahkan untuk memfitnah yang lain."

(Gus Hans) "Ini adalah komitmen, kami menekankan kepada seluruh pendukung kami, jangan sekali-kali melakukan hoaks, jangan sekali-kali memfitnah, jangan sekali-kali menjelek-jelekkan yang ... kepada pihak yang lain, karena semua adalah keluarga kita."

Istilah kata seperti "jujur" dan "integritas" merupakan kata-kata yang sering diulang dalam pidato ini. Hal ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai dalam kampanye mereka, yang menegaskan bahwa mereka ingin menciptakan citra diri sebagai pihak yang bersih dan beretika di mata masyarakat.

Istilah kata seperti "memfitnah" dan "menjelek-jelekkan" juga diulang-ulang dalam pidato ini sebagai himbauan kepada pendukung mereka untuk tidak melakukan kedua hal tersebut demi memenangkan mereka dalam pilkada ini. Hal ini merupakan 'integritas' yang mereka coba perlihatkan dalam kampanye mereka kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa yang akan

‘jujur’ dan ‘berintegritas’ tidak hanya Risma-Gus Hans dan seluruh tim suksesnya saja, namun juga masyarakat sebagai pemilih yang menjadi pendukung mereka.

3. Metafora

Gus Hans juga menggunakan metafora dalam bentuk pantun untuk menyampaikan inti dari pidatonya, hal ini disampaikan dalam gaya yang ringan namun efektif untuk menarik perhatian masyarakat.

(Gus Hans)

"Angin kencang

Makan roti pakai mentega

Saya jamin rakyat sejahtera

Jangan lupa pilih nomor tiga."

Pada baris "roti pakai mentega, saya jamin rakyat sejahtera" Gus Hans menyampaikan optimisme dan janjinya tentang kesejahteraan rakyat apabila dia terpilih. Dia juga menyertakan "jangan lupa pilih nomor tiga" sebagai seruan kepada masyarakat apabila ingin 'rakyat sejahtera' seperti yang dia sampaikan pada baris sebelumnya, maka masyarakat harus memilih paslon no. 3, yang merupakan nomor urut pasangan Risma-Gus Hans, pada saat pemilu nanti.

(Gus Hans)

"Tuku kandang kandange trawelu

Insyallah sing menang nomor telu."

Pada baris "Insyallah sing menang nomor telu" Gus Hans menyampaikan optimismenya dalam bentuk kepasrahan dan harapannya kepada Tuhan YME.

(Gus Hans)

"Naik sepeda ke Surabaya

Ke Surabaya ketemu mba-mba muda

Pilihan berbeda adalah hal biasa

Ayo utamakan kerukunan bersama."

Pada baris "pilihan berbeda adalah hal biasa, ayo utamakan kerukunan bersama" Gus Hans menyampaikan kepada masyarakat bahwa perbedaan pendapat dan visi yang dilihat pada setiap paslon pada sesama masyarakat merupakan hal yang wajar, dan menghimbau mereka untuk menjaga kerukunan walaupun hal tersebut terjadi. Ini juga upaya Gus Hans dalam menggambarkan bahwa dia dan Risma merupakan paslon yang menghargai perbedaan pendapat dan pilihan pada masyarakat.

(Gus Hans)

"Gawe pupuk warnane ireng

Tukune nang tokone mba ajeng

Teklene pilgub senenge bareng

Ayo kampanyene digawe gayem."

Pada baris “teklene pilgub senenge bareng, ayo kampanyene digawe gayem,” Gus Hans menyampaikan himbauan dan ajakan kepada masyarakat dan sesama paslon untuk menghindari konflik dan menjalani proses pilgub dan kampanye dengan suasana yang senang, damai dan tenteram.

4. Praktik Wacana

Dimensi pada praktik wacana yang dilakukan dalam pidato dalam sudut pandang masyarakat sebagai target audiens pada pidato ini. Pidato tersebut berlangsung dalam konteks deklarasi kampanye damai untuk Pilgub Jatim 2024, sehingga audiens utamanya adalah para pemilih dan pendukung dari berbagai calon, bahkan para paslon itu sendiri. Beberapa temuan yang dicantumkan adalah:

(Risma) "Yang saya hormati bapak gubernur Prov. Jawa Timur beserta Forkopimda, yang saya hormati ketua KPU beserta seluruh komisioner KPU, yang saya hormati ketua Bawaslu dan seluruh anggota Bawaslu, yang saya hormati para alim ulama para pemuka agama, dan yang saya hormati saya cintai mbak Luluk dan mas Lukman paslon no. 1, dan yang saya hormati dan saya cintai ibu Khofifah dan mas Emil paslon no. 2, seluruh tim pemenang rekan-rekan yang mulia hadirin bapak ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu."

Pada salah satu bagian pembuka pidato ini Risma menyampaikan rasa hormatnya kepada berbagai kalangan pejabat struktural pemerintahan dan pejabat organisasi penyelenggara acara sebagai prosedur formalitas yang biasa dilakukan di acara-acara resmi seperti pada saat disampaikannya pidato kali ini. Hal yang tidak biasa pada bagian pembuka pidato ini adalah disampaikannya penghormatan kepada para pemuka agama, ini merupakan upaya Risma dalam menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang menghargai para pemuka agama, hal ini dipengaruhi juga oleh pasangannya dalam pilgub kali ini, Gus Hans, yang juga merupakan pemuka agama.

Hal lain yang tidak biasa pada pembuka pidato ini adalah penghormatan Risma kepada kedua paslon lain, Luluk-Lukman dan Khofifah-Emil, yang secara teknis kedua pasangan tersebut merupakan ‘lawan’ nya di pilgub kali ini. Hal ini merupakan upaya Risma dalam membuat wacana kepada para paslon dan masyarakat bahwa dia tidak berniat untuk menciptakan suasana persaingan yang tidak baik kepada paslon lain, penjelasan ini diperkuat dengan adanya kata “saya cintai” yang diucapkan oleh Risma setiap sebelum menyebutkan nama paslon.

(Risma) "Serta bapak ibu sekalian kami saya dengan Gus Hans dan seluruh tim kami insya Allah kami akan menyelenggarakan kampanye pemilu dengan kejujuran dan integritas yang tinggi"

(Risma) "Karena itu bapak ibu sekalian yang saya hormati, yakinlah bahwa kami pasangan saya-Gus Hans, sekali lagi pasangan no. 3, serta seluruh tim kampanye kami, kami akan melakukan seluruh proses Pemilukada dengan jujur dan berintegritas, insya Allah tidak ada niatan apa pun untuk menjelek-jelekkan siapa pun bahkan untuk memfitnah yang lain"

(Gus Hans) "Ini adalah komitmen, kami menekankan kepada seluruh pendukung kami, jangan sekali-kali melakukan hoax, jangan sekali-kali memfitnah, jangan sekali-kali menjelek-jelekkan yang ... kepada pihak yang lain, karena semua adalah keluarga kita."

(Gus Hans) "Inilah prinsip kita, kami dan Bu Risma tidak memiliki agenda apa pun kecuali ingin berpartisipasi meningkatkan dan juga menjaga martabat provinsi ini ... yang martabat dan tidak menjadi bagian dari agenda politik nasional"

Bagian ini dibuat untuk memperkuat citra paslon no. 3 sebagai pasangan yang jujur, berintegritas, dan bebas dari praktik kampanye hitam. Hal ini tercermin dari banyaknya rujukan kepada nilai-nilai moral serta upaya untuk menghindari perilaku memfitnah atau merendahkan lawan politik. Foucault juga mengatakan bahwa wacana membentuk bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan identitas mereka, dalam hal ini, Risma-Gus Hans mencoba membentuk citra diri mereka sebagai pemimpin yang berintegritas dan sebagai 'penjaga' moralitas politik di Jawa Timur. Dengan mendefinisikan diri mereka dalam istilah seperti "jujur", "berintegritas", dan "tidak memiliki agenda politik nasional", mereka menciptakan subjektivitas mereka sendiri serta audiens mereka yang diharapkan menempatkan kepercayaan kepada mereka berdasarkan citra ini.

Himbauan larangan yang berulang pada kata "memfitnah" dan "menjelek-jelekkan" merupakan sesuatu yang ingin ditekankan oleh Risma-Gus Hans dalam pidato kali ini. Hal ini dipengaruhi oleh adanya isu rivalitas politik antar paslon di tengah-tengah masyarakat, dari ketiga nama calon gubernur tersebut Risma dan Khofifah adalah nama yang telah lama diisukan menjadi rival politik, lebih tepatnya pada masa pandemi COVID-19. Pada saat itu Khofifah yang menjabat sebagai gubernur Jawa Timur dinilai menghambat pergerakan Risma, yang merupakan wali kota Surabaya, dalam mengatasi melonjaknya wabah COVID-19 di Surabaya. Dalam konteks ini, himbuan larangan pada kata "memfitnah" dan "menjelek-jelekkan" dapat disimpulkan sebagai upaya Risma-Gus Hans dalam mengindahkan isu-isu rivalitas antara Risma dan Khofifah diantara masyarakat, agar masyarakat tidak serta merta menyimpulkan segala kata-kata atau tindakan mereka selama kampanye sebagai suatu 'serangan' kepada pihak Khofifah atau paslon yang lain.

Upaya Risma-Gus Hans dalam 'mengindahkan' isu-isu yang mengelilinginya dengan paslon lain merupakan contoh dari apa yang dituturkan oleh Foucault mengenai wacana yang menciptakan kebenaran tertentu dalam masyarakat. Dalam pidato ini, baik Risma maupun Gus Hans menggunakan wacana tertentu untuk membentuk kampanye mereka sebagai gerakan yang jujur, berintegritas, dan damai. Mereka menciptakan sebuah 'kebenaran' atau persepsi bahwa mereka adalah kandidat yang bersih dari tindakan negatif seperti hoax dan fitnah. Ini adalah contoh bagaimana 'pengetahuan' Risma-Gus Hans, akan kebenaran isu-isu yang ada, dapat memberikan mereka 'kuasa' dalam menentukan wacana yang ingin mereka bentuk kepada masyarakat. Karena apapun yang ingin mereka sampaikan kepada publik mengenai isu tersebut merupakan suatu 'kebenaran' bagi audiens. Ini merupakan contoh bagaimana wacana dapat digunakan untuk membentuk opini publik mengenai citra, karakter dan moralitas paslon.

(Risma) "Hanya modal itulah maka akan lahir komitmen Jawa Timur yang akan melanjutkan semua perjuangan para pendiri bangsa para pahlawan di kota pahlawan yang saat ini kita berada di suatu tempat dimana ribuan para pahlawan telah gugur memperjuangkan ... cita-cita bersama"

Risma mengacu pada sejarah Jawa Timur dan Surabaya, tempat dimana pidato tersebut dilaksanakan, sebagai 'Kota Pahlawan' serta menyebutkan perjuangan pahlawan nasional yang ada di daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ikatan emosional dengan masyarakat lokal, yang menjadi target audiens mereka, sambil menghubungkannya dengan perjuangan politik

mereka untuk memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang mereka coba capai sekarang ini merupakan 'cita-cita' yang para pahlawan nasional tersebut coba capai selama ini dengan menyebutnya sebagai 'cita-cita bersama'.

Dalam pidato ini, bahasa digunakan sebagai alat untuk menegaskan kekuasaan moral atas pihak lain. Risma-Gus Hans berkali-kali menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan kampanye negatif dan menekankan pentingnya menjaga integritas, dan bagaimana tujuan yang mereka coba capai merupakan tujuan para pahlawan bangsa yang perjuangkan di zaman dahulu. Melalui wacana ini, mereka berusaha memposisikan diri sebagai pihak yang memegang teguh moralitas politik dan semata-mata ingin memajukan Jawa Timur di mata masyarakat. Mereka membentuk wacana kepada audiens untuk mempercayai bahwa 'kuasa' yang dimiliki adalah 'kuasa yang sah dan benar' karena didasari pada nilai-nilai kejujuran dan komitmen mereka terhadap Prov. Jawa Timur. Hal ini mencerminkan konsep kuasa Foucault yang mengalir melalui institusi, praktik sosial, dan bahkan pidato seperti ini.

5. Praktik Sosial

Dimensi ini melibatkan hubungan antara teks dan struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, pidato tersebut merujuk pada struktur politik dan budaya terkait pemilihan gubernur di Jawa Timur.

6. Hubungan Kekuasaan

(Risma) "dan yang saya hormati saya cintai mbak Luluk dan mas Lukman paslon no. 1, dan yang saya hormati dan saya cintai ibu Khofifah dan mas Emil paslon no. 2."

(Gus Hans) "Para paslon adalah orang-orang yang hebat, representasi masyarakat Jawa Timur yang hebat."

Pidato ini mencerminkan dinamika kekuasaan dalam persaingan politik. Dalam konteks pidato ini Risma-Gus Hans mencoba untuk membangun wacana hubungan baik antar paslon, walaupun adanya isu-isu yang mengelilingi Risma dan Khofifah. Sebagaimana Risma yang menyebutkan para paslon pada pembuka pidato sebagai sosok yang 'dihormati' dan 'dicintai', hal ini juga diikuti oleh Gus Hans yang menyebutkan para paslon sebagai 'orang-orang yang hebat'.

(Risma) "Karena itu bapak ibu sekalian yang saya hormati, yakinlah bahwa kami pasangan saya-Gus Hans, sekali lagi pasangan no. 3, serta seluruh tim kampanye kami kami akan melakukan seluruh proses pemilukada dengan jujur dan berintegritas, insya Allah tidak ada niatan apapun untuk menjelek-jelekkan siapapun bahkan untuk memfitnah yang lain."

(Risma) "Ini adalah komitmen, kami menekankan kepada seluruh pendukung kami, jangan sekali-kali melakukan hoax, jangan sekali-kali memfitnah, jangan sekali-kali menjelek-jelekkan yang ... kepada pihak yang lain, karena semua adalah keluarga kita."

Risma-Gus Hans dalam hal ini 'membantu' para paslon lain, khususnya Khofifah yang dinilai memiliki isu dengan Risma, dalam mencegah isu-isu serupa muncul dikarenakan adanya wacana rivalitas politik yang ada dengan menekankan kepada masyarakat untuk tidak memfitnah, menyebarkan hoax dan menjelek-jelekkan kepada pihak yang lain. Hal ini diperjelas oleh Gus Hans yang menyebutkan bahwa mereka para paslon yang dipilih dan masyarakat yang memilih adalah 'keluarga'.

Wacana yang Risma-Gus Hans coba bangun tidak sesuai dengan latar belakang yang mendasari hubungan antara Risma-Gus Hans dan paslon kedua, yaitu Khofifah-Emil. Ketidakharmonisan pada rekam jejak hubungan antar kedua paslon, khususnya Risma dan Khofifah sendiri, diketahui terjadi pada saat pandemi COVID-19 yang mana keduanya berulang kali memiliki pendapat yang berbeda dalam mengambil langkah dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 di wilayah yurisdiksinya masing-masing. Konflik ini menarik perhatian dan kritik dari para pengamat politik pada saat itu, karena perseteruan selama pandemi ini berlanjut dari satu isu ke isu lainnya. Beberapa contoh konflik Risma dan Khofifah selama wabah COVID-19 yaitu ketika Risma menyampaikan kekesalannya ketika rumah sakit di Jawa Timur dipenuhi oleh pasien dari luar daerah Jawa Timur, dan Khofifah menanggapi dengan menyatakan bahwa etika kedokteran tidak memperbolehkan dokter maupun rumah sakit untuk menolak pasien berdasarkan ras, identitas kedaerahan, politik dan sebagainya. Kasus lain yang menyebabkan perseteruan antara Risma dan Khofifah adalah ketika adanya kesalahpahaman dalam komunikasi terkait penempatan mobil yang memfasilitasi tes PCR (Polymerase Chain Reaction) yang berguna untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi penyakit COVID-19. Risma merasa sudah terlebih dahulu mengupayakan pengadaan dua mobil tersebut untuk digunakan di Surabaya, namun tanpa sepengetahuan Risma pihak provinsi memindahkannya ke Kab. Lamongan dan Tulungagung. Kasus lain yang menjadi pembentuk perspektif masyarakat tentang buruknya hubungan Risma dan Khofifah yaitu masih di masa pandemi COVID-19, yang pada saat itu Khofifah menyindir kebijakan Risma yang tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi sebelum membatasi pergerakan kendaraan yang masuk ke Kota Surabaya sebagai langkah dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Semua contoh kasus yang melatarbelakangi representasi hubungan Risma dan Khofifah di mata masyarakat yang telah disebutkan hanyalah puncak dari gunung es, dimana masih banyak lagi yang tidak dipaparkan dalam penjelasan ini.

7. Identitas dan Kedaerahan

(Gus Hans) "Para paslon adalah orang-orang yang hebat, representasi masyarakat Jawa Timur yang hebat, maka jangan kotori proses .. dengan perilaku yang kotor yang tidak berkualitas mari jaga integritas demi menjaga martabat dari Prov. Jawa Timur."

Gus Hans menegaskan bahwa baik para paslon yang dipilih maupun masyarakat yang dipilih merupakan satu kesatuan, semuanya bagian dari masyarakat Jawa Timur. Gus Hans menambahkan nilai-nilai kesatuan dalam pidatonya untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka bukanlah lawan bagi satu sama lain, hal itu bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk tidak 'mengotori' proses pilkada tersebut dengan menggunakan cara-cara yang curang demi menguntungkan suatu golongan saja. Karena menurutnya yang akan 'kotor' tidak hanya suatu golongan tersebut, namun 'martabat' mereka semua yang merupakan bagian dari masyarakat Jawa Timur.

(Gus Hans) "Inilah prinsip kita, kami dan Bu Risma tidak memiliki agenda apa pun kecuali ingin berpartisipasi meningkatkan dan juga menjaga martabat provinsi ini ... yang martabat dan tidak menjadi bagian dari agenda politik nasional terkesan kita adalah provinsi yang dikendalikan oleh orang-orang lain, jangan tunjukkan kita adalah provinsi yang bisa dikendalikan oleh orang-

orang lain. Kita adalah kita, Jawa Timur adalah Jawa Timur, dan kita harus bangga dengan kehebatan Jawa Timur."

Gus Hans berupaya untuk menanamkan pemikiran kepada masyarakat dengan membawa kata "martabat" dengan tujuan masyarakat merasa bahwa 'martabat' mereka sendiri sebagai masyarakat Jawa Timur yang akan 'ternodai' apabila berpihak kepada paslon yang memiliki agenda politik tersendiri dalam pemilihan gubernur ini. Gus Hans disini menegaskan bahwa Jawa Timur adalah provinsi yang kuat dan tidak seharusnya dikendalikan oleh 'orang lain' atau agenda politik dari luar daerah. Pernyataan Gus Hans pada "Kita adalah kita, Jawa Timur adalah Jawa Timur, dan kita harus bangga dengan kehebatan Jawa Timur" ini mencerminkan wacana nasionalisme daerah pada masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat rasa kebanggaan dan identitas daripada masyarakat Jawa Timur, serta memperkuat posisinya sebagai sesama bagian dari masyarakat Jawa Timur di mata audiens.

Dalam konteks ini, melihat dari sudut pandang Foucault yang menekankan bahwa kuasa tidak pernah absolut dan selalu ada pertentangan di dalamnya, Gus Hans menyebutkan pentingnya "tidak menjadi bagian dari agenda politik nasional" dan "tidak dikendalikan oleh orang-orang lain", dengan kata lain ada suatu pertentangan yang akan 'menolak' sudut pandang politik yang Risma-Gus Hans bawa. Ini mencerminkan adanya 'kekuatan-kekuatan' eksternal yang mencoba mempengaruhi situasi di Jawa Timur, dan pada baris pidato ini Gus Hans mencoba menolak dan mengajak masyarakat untuk melawan 'kekuatan' tersebut. Ini menunjukkan dinamika kekuasaan yang terus-menerus bernegosiasi, di mana kekuatan yang satu selalu berusaha mendominasi yang lain.

8. Dampak Pidato dan Identitas Pemilih

Dari pidato ini bisa dilihat bahwa Risma-Gus Hans dalam pidatonya cenderung menggunakan kata-kata yang 'pasif' dan merendahkan, tidak mengandung kata-kata yang menunjukkan kualitas pasangannya sebagai paslon. Pengaruh tema dari acara pidato kampanye yang diadakan oleh KPU ini, deklarasi kampanye damai, mungkin memiliki peran dalam hal ini. Namun adanya tema tersebut tidak membuat paslon lain menyampaikan pidatonya 'merendahkan' seperti yang dilakukan Risma-Gus Hans, seperti sebagaimana mereka berkali-kali menekankan bahwa mereka akan menjalani proses pilkada dengan jujur dan tanpa ada mencoba 'menyerang' atau menjelek-jelekkan paslon lain. Berbeda dengan Risma-Gus Hans, paslon lain seperti Luluk-Lukmanul dan Khofifah-Emil dalam pidatonya di acara ini lebih mengarah ke menegaskan bahwa pencalonan mereka dalam pilkada ini semata-mata demi kepentingan masyarakat Jawa Timur.

Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dilakukan setelah pidato deklarasi kampanye damai, paslon Khofifah-Emil mempunyai tingkat keterpilihan atau elektabilitas 52,5 persen, diikuti oleh paslon Risma-Gus Hans yang berada di angka 20,9 persen dan Luluk-Lukmanul yang berada di urutan terakhir di angka 3,8 persen. Hal yang menarik adalah bagaimana pembagian identitas dari para pemilih masing-masing paslon, terutama paslon Khofifah-Emil dan Risma-Gus Hans yang berdasarkan persentase elektabilitas keduanya jauh diatas paslon Luluk-Lukmanul. Data survei menunjukkan bahwa semakin rendah kelas sosial ekonomi dan tingkat pendidikan pemilih maka suara yang mengarah kepada Khofifah-Emil semakin besar, sebaliknya semakin tinggi kelas sosial ekonomi pemilihnya, semakin besar suara yang diberikan kepada pasangan Risma-Gus Hans,

sedangkan dalam segi tingkat pendidikan pemilih Risma-Gus Hans dinilai tingkat pendidikan kelas menengah.

Data hasil survei ini menunjukkan strategi pidato kampanye yang digunakan oleh pasangan calon Risma-Gus Hans selama pilkada ini, terutama pada saat acara deklarasi kampanye damai tersebut. Risma-Gus Hans cenderung menggunakan strategi pidato yang 'merendah' daripada 'mempromosikan' kualitas keduanya sebagai seorang pemimpin pada pidato tersebut mungkin karena mereka sudah menentukan target audiens yang ingin mereka 'pengaruhi' yaitu masyarakat dengan kelas sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Masyarakat dengan kelas sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang tergolong rendah mungkin lebih memilih calon pemimpinnya berdasarkan kepribadiannya, seperti apakah dia rendah hati, baik, jujur dan lain sebagainya. Sebaliknya masyarakat dengan kelas sosial ekonomi yang tergolong tinggi mungkin lebih memilih calon pemimpinnya berdasarkan kualitas potensinya sebagai seorang pemimpin, seperti bagaimana dia menyampaikan program-program kerjanya, apakah program-program tersebut sesuai dengan Prov. Jawa Timur yang mereka cita-citakan, apakah realistis untuk dilakukan, dan lain sebagainya. Risma-Gus Hans mungkin tidak ingin digambarkan sebagai pasangan yang pamer atau sombong oleh para target audiensnya apabila menyampaikan pidato yang berisi kualitas kerjanya selama ini atau sejenisnya. Dalam hal ini mungkin hasil usaha paslon Risma-Gus Hans untuk meyakinkan audiens dari golongan tertentu pada pidato ini masih kurang berhasil sebagaimana hasil dari survei elektabilitas keduanya masih di bawah paslon Khofifah-Emil, walaupun paslon ini dalam pidatonya tidak menggunakan strategi yang sama dengan Risma-Gus Hans.

KESIMPULAN

Pembahasan dan hasil analisis pidato Risma-Gus Hans menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) menurut Norman Fairclough serta konsep kekuasaan Michel Foucault. Analisis ini memecah pidato mereka ke dalam tiga dimensi: teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Pada dimensi teks, Risma memulai pidatonya dengan sapaan yang mencerminkan inklusivitas, menyapa berbagai agama dan kepercayaan. Ini menunjukkan usahanya untuk merangkul semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Penggunaan kata kunci seperti "jujur" dan "integritas" sering diulang dalam pidato mereka, yang menegaskan komitmen mereka terhadap kampanye yang bersih dan bermoral. Gus Hans juga menggunakan metafora dalam bentuk pantun yang menyampaikan pesan kampanye dengan cara yang menarik agar menarik perhatian masyarakat, menyoroti jaminan kesejahteraan rakyat serta pentingnya menjaga kerukunan di tengah perbedaan politik.

Dalam praktik wacana, pidato ini diarahkan kepada audiens yang terdiri dari pemilih dan paslon lain, dalam konteks deklarasi kampanye damai. Risma-Gus Hans menekankan pentingnya nilai kejujuran, penolakan terhadap kampanye hitam, dan integritas yang tinggi. Mereka berusaha membentuk citra diri sebagai pemimpin yang bermoral dan bersih. Di samping itu, berulang kali memberikan himbauan untuk menghindari fitnah dan perselisihan disampaikan untuk meredakan isu rivalitas politik, khususnya antara Risma dan Khofifah, yang pernah diberitakan memiliki hubungan yang kurang baik di masa lalu.

Pada praktik sosial, pidato mereka mencerminkan dinamika politik di Jawa Timur, di mana Risma-Gus Hans berupaya membangun hubungan baik dengan paslon lain serta menghindari konflik sosial. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga martabat Jawa Timur dari pengaruh

luar, yang dalam hal ini disebut Gus Hans sebagai agenda politik nasional. Gus Hans juga menyoroti kebanggaan daerah dan identitas Jawa Timur, mengajak masyarakat untuk menjaga martabat daerah mereka dan tidak membiarkan provinsi mereka dikendalikan oleh kekuatan dari luar.

Secara keseluruhan, pada pidato ini bisa dilihat bagaimana Risma-Gus Hans memiliki 'kuasa' dalam mempengaruhi masyarakat agar dapat membentuk citra mereka di mata masyarakat, sehingga masyarakat sebagai pemilih memiliki pemikiran yang sesuai dengan apa yang Risma-Gus Hans inginkan terhadap mereka pada pemilihan gubernur Prov. Jawa Timur 2024.

REFERENSI

- Afifah, N. M., & Darmawan, A. P. (2024, November 15). Hasil survei Litbang Kompas Pilkada Jatim 2024: Khofifah-Emil 52,5 persen, Risma-Gus Hans 20,9 persen, Luluk-Lukman 3,8 persen. Kompas.com. <https://www.kompas.com>
- Ankit, K., Rundé, S., & Schöning, J. (2020). The role of flag emoji in online political communication. *Social Science Computer Review*.
- Bahasoan, A., & Kotarumalos, A. F. (2014). Praktek relasi wacana dan kuasa Foucaultian dalam realitas multi profesi di Indonesia. *Populis*, 8(1), 13–22.
- Dahl, R. A. (1957). The concept of power. *Behavioral Science*, 2(3), 201–215. <https://doi.org/10.1002/bs.3830020303>
- Eriyanto. (2001). Analisis wacana: Pengantar analisis teks media. LKiS.
- Fairclough, N. (1989). *Language and power*. London: Longman.
- Fairclough, N. (2000). *Language and power* (2nd ed.). London: Longman.
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed., Vol. 2). Routledge.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books.
- Friskanov, I. S. (2021). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili perkara fiktif positif. *Riau Law Journal*, 5(1), 45–59.
- Gunawan, A., Moenta, A. P., Guntur, M., & Hasrul, M. (2018). The essence of the presidential election as a political education instrument. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 71, 1–8.
- Jatim Newsroom. (2024). Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur: Resmi, KPU Jatim tetapkan tiga pasangan calon di Pilgub Jatim 27 November 2024. jatimprov.go.id.
- KPU Jawa Timur. (2024). Laporan dan data pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.
- Metro TV. (2024, September 24). Breaking news - Pidato Risma-Gus Hans di deklarasi kampanye damai Pilgub Jatim 2024 [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=aofg3jIQRsk>
- Nimmo, D. (2005). *Komunikasi politik*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmanto, T. Y. (2018). Calon tunggal dalam perspektif hak memilih dan dipilih di Provinsi Banten. *Jurnal HAM*, 9(1), 1–16.
- Rajasundaram. (1981). *Manual of development communication with special reference to broadcasting*. Asian Mass Communication Research and Information Centre.
- Sapir, E. (1921). *Language: An introduction to the study of speech*. Harcourt, Brace and Company.
- Solito, L., & Sorrentino, C. (2020). Political communication and social change: Political communication and challenges in the digital age. *Icono14*, 18(1), 16–31.
- Snyder, L. B., & Hamilton, M. A. (2002). A meta-analysis of US health campaign effects on behaviour: Emphasize enforcement, exposure, and new information, and beware the secular trend. In R. Hornik (Ed.), *Public health communication: Evidence for behavior change* (pp. 357–383). Routledge.
- Sufianto, D. (2020). Pasang surut otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 85–99. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2>.
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 221–238.
- van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A multidisciplinary approach*. London: Sage Publications.